

APLIKASI PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL BIDANG PERMUKIMAN

Studi Kasus: DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROV. JABAR

Muhtarudin¹, Gita Destiana²

^{1,2} Program Studi Komputer Akuntansi Institut Digital Ekonomi LPKIA

Jln. Soekarno Hatta No. 456 Bandung 40266, Telp. 022 75642823, Fax. 022 7564282

¹muhtar@lpkia.ac.id, ²gitadestiana58@yahoo.com,

ABSTRAK

Sistem informasi akuntansi pelaksanaan anggaran yang diterapkan di Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Bidang Permukiman Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Permukiman terdapat kendala yang dihadapi yaitu mengenai proses penyimpanan data karena proses pencatatan pelaksanaan anggaran yang masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan proses yang cukup lama dan adanya keterlambatan.

Berdasarkan analisis dari kendala yang ada pada Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu khususnya pelaksanaan anggaran biaya operasional di bidang permukiman, penulis mengusulkan akan membangun sebuah aplikasi berbasis *database* menggunakan *Microsoft Office Access 2013* yang dapat menangani seluruh proses data transaksi pelaksanaan anggaran biaya operasional secara tepat dan cepat, merancang laporan yang dapat menampilkan laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), laporan KRA (Kinerja Realisasi Anggaran), Daftar Rekening dan Daftar Pegawai Penandatanganan sehingga kebutuhan dan informasi dapat tercapai dengan cepat dan mudah.

Pembuatan sistem informasi pelaksanaan anggaran biaya operasional ini dapat membantu kinerja pada Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu terutama dalam melakukan transaksi pencatatan pengeluaran anggaran dengan proses sistem yang terkomputerisasi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan atau informasi yang dibutuhkan.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Akuntansi, Anggaran, Biaya Operasional,*

1. Pendahuluan

Sistem Informasi menjadi sangat penting bagi pihak luar yang membutuhkannya mengingat banyaknya informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Dengan adanya Sistem Informasi dapat mempermudah kita dalam memperoleh dan memberikan data serta informasi dengan cepat dan akurat. Dengan adanya Sistem Informasi pada perusahaan, menjadikan perusahaan lebih produktif dan meningkatkan sistem kerja dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu (Peraturan Menteri Keuangan RI:No.162/PMK.05/2013). Fungsi dan tugas BPP yaitu melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan pembukuan sebagaimana

pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. BPP bertugas sebagaimana bendahara menjalankan tugas-tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Adapun Permasalahan yang ditemukan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional di BPP Diskimrum, masih menggunakan sistem berkas sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan laporan sehingga Kasubag Keuangan (Bendahara Pengeluaran) sulit untuk mengevaluasi.
2. Bagaimana prosedur dan proses pelaksanaan anggaran biaya operasional yang diterapkan

BPP dapat berfungsi dengan efektif dan akurat ?

3. Proses pencatatan pelaksanaan anggaran biaya operasional yang masih manual sehingga perlu dibuatkan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan.

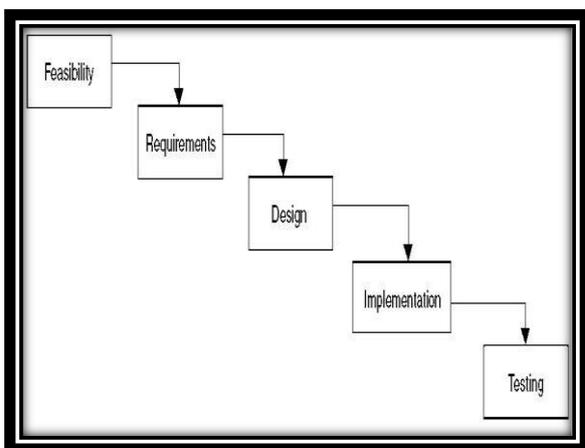
Adapun batasan masalah yang diambil yaitu Tidak membahas proses bisnis sistem akuntansi pelaksanaan anggaran dari pengajuan anggaran operasional.

Adapun tujuan perancangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Aplikasi yang dapat memudahkan dalam pencatatan bukti pengeluaran biaya operasional.
2. Untuk mengetahui Aplikasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional yang memudahkan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan BP (Bendahara Pengeluaran) dalam mengevaluasi hasil laporan.
3. Untuk membangun Aplikasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional yang dapat menghasilkan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran.

untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem tentu membutuhkan metode pengembangan sistem, Metode pengembangan system yang diambil untuk membangun aplikasi pelaksanaan anggaran biaya operasional di bagian BPP DisKimRum adalah *Waterfall* (Model Air Terjun).

Waterfall sebagai metodologi pengembangan system yang pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linier, yaitu jika langkah satu belum dikerjakan maka tidak akan bisa melakukan pengerjaan langkah 2, 3 dan seterusnya. Secara otomatis tahapan ke-3 akan bisa dilakukan jika tahap ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan, seperti tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Urutan dari Waterfall

Oleh karena itu, alat yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem adalah bagan alir

dokumen (*Mapping Chart*), Diagram Konteks (*Context Diagram*), Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*), Kamus Data, Entity Relationship (*ERD*).

2. Dasar Teori

Pengertian aplikasi menurut Hakim yaitu, “Perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows dan permainan (game), dan sebagainya”. (2009)

Pengertian Pelaksanaan Menurut Westra adalah:

“Sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”. (Adisasmita, 2011)

Menurut Nafarin mendefinisikan Anggaran adalah “Suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan (2007 : 11)”. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang. Pengertian Anggaran menurut M Munandar merupakan :

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang”. (Munandar, 2001)

Adapun tujuan anggaran yang dikemukakan oleh Nafarin (2004:15) adalah:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang di cari dan digunakan.
3. Merinci jenis sumber dana yang di cari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan.
4. Merasionalkan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah di susun, karena dengan adanya anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Menampung dana menganalisa serta memutuskan setipa usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut Mamesah pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD):

“Sebagai rencana operasional/keuangan daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud” (1995:17)

Menurut Sudarsono dan Edilius mengemukakan bahwa pengertian biaya operasional adalah “Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional usaha sebuah perusahaan”. (2001:201)

Definisi beban biaya atau biaya (cost), biaya operasional merupakan seluruh pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan/instansi untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3. Hasil Penelitian

3.1 Prosedur Sistem Berjalan

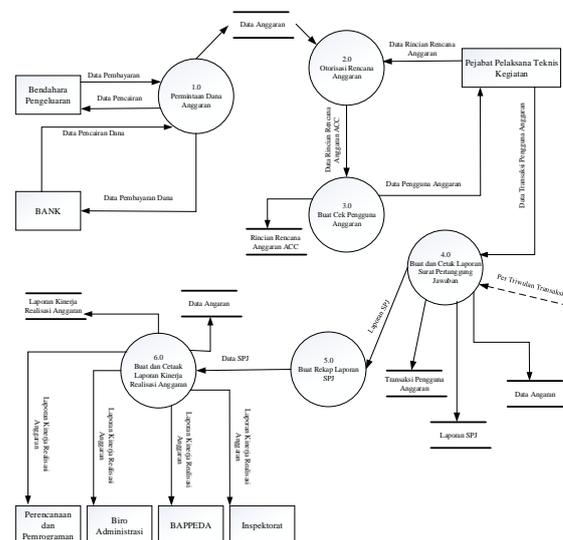
1. Bagian BPP (bendahara pembantu pengeluaran) mengajukan Surat Perintah Pencairan ke bagian BP (bendahara pengeluaran), setelah Surat Perintah Pencairan di verifikasi oleh bagian BP kemudian bagian BP mengeluarkan Surat Perintah Membayar untuk BPP.
2. Bagian BPP menerima Surat Perintah Membayar dari BP, BPP kemudian mencairkan dana APBD ke bank melalui rekening atas nama Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas dan BPP pun menerima bukti pencairan dana beserta uang APBD.
3. Selanjutnya bagian PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) mengajukan rencana anggaran ke BPP untuk di otorisasi dan diturunkannya dana anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang sedang dijalankan oleh PPTK.
4. Setelah rencana anggaran di setuju oleh BPP berdasarkan rinciannya maka bagian BPP mengeluarkan cek penggunaan anggaran untuk PPTK guna realisasi rencana anggaran yang akan di jalankan beserta dengan uang persediaan.
5. Bagian PPTK menerima cek penggunaan anggaran beserta dengan uang dari BPP, bagian PPTK kemudian menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PPTK seperti belanja pegawai : perjalanan dinas dan biaya tenaga teknis serta belanja barang atau jasa : pembelian ATK dan biaya ManMin (makan minum) untuk rapat koordinasi.
6. Saat bagian PPTK menggunakan dana anggaran untuk kegiatan operasional maka bagian PPTK memberikan bukti-bukti transaksi untuk pembiayaan ke bagian BPP yang akan diproses oleh BPP dengan dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) per Triwulan Transaksi.
7. Berdasarkan SPJ yang dibuat oleh BPP, selanjutnya BPP akan melakukan rekapitulasi belanja anggaran dari seluruh transaksi yang berasal dari PPTK yang kemudian akan dibuatkan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran.
8. Apabila Laporan Kinerja Realisasi Anggaran telah dibuat maka laporan tersebut oleh BPP akan dibuatkan menjadi 5 rangkap yang

kemudian oleh BPP akan dikirimkan masing-masing kepada pihak yang terkait untuk menerima laporan bahwa dana APBD telah diserap/digunakan dengan se-maksimal dan se-efektif mungkin.

9. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran rangkap 2 diberikan ke PP (perencanaan dan pemrograman), rangkap 3 ke Biro Administrasi Pembangunan, rangkap 4 ke BAPPEDA, rangkap 5 ke Inspektorat dan LKRA rangkap 1 di arsip oleh bagian BPP.

3.2 DFD Level 0 Sistem Berjalan

Data flow diagram merupakan tool yang digunakan untuk memodelkan aliran data pada sebuah system yang ada dalam metode pengembangan sistem yang terstruktur berikut ini DFD level 0 sistem pelaksanaan anggaran biaya operasional bidang permukiman.



Gambar 3.1 DFD Level 0 Sistem Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Yang berjalan

3.3 Dokumen Yang Manjadi Data Masukan

Nama Dokumen	: Nota
Sumber	: CV Karya Jembar Semeru Input untuk membuat Laporan
Fungsi	: SPJ dan Laporan KRA
Media	: Kertas
Rangkap	: 2 Setiap Pelaksanaan Anggaran
Frekuensi	: Kegiatan Bukti Pelaksanaan Anggaran
Keterangan	: Kegiatan

Tabel 3.1 Nota

Nama Dokumen	: Kwitansi Sewa Kendaraan
--------------	---------------------------

Sumber	: PT Sami Shazia Kurnia
Fungsi	: Input untuk membuat Laporan
Media	: Kertas
Rangkap	: 2
	: Setiap Pelaksanaan Anggaran
Frekuensi	: Kegiatan
	: Bukti Pelaksanaan Anggaran
Keterangan	: Kegiatan

Tabel 3.2 Kwitansi Sewa Kendaraan

Nama	
Dokumen	: Kwitansi Perjalanan Dinas
	: BPP (Bendahara Pengeluaran)
Sumber	: Pembantu
Fungsi	: Input untuk membuat Laporan
	: SPJ dan Laporan KRA
Media	: Kertas
Rangkap	: 2
	: Setiap Pelaksanaan Anggaran
Frekuensi	: Kegiatan
	: Bukti Pelaksanaan Anggaran
Keterangan	: Kegiatan

Tabel 3.3 Kwitansi Perjalanan Dinas

3.4 Dokumen Yang Manjadi Data Keluaran

Nama	
Dokumen	: Laporan SPJ
	: BPP (Bendahara
	: Pengeluaran Pembantu)
Sumber	: Pertanggung Jawaban
Fungsi	: Pelaksanaan Anggaran
Media	: Kertas
Rangkap	: 2
Frekuensi	: Setiap Akhir Bulan
	: Laporan Surat Pertanggung
Keterangan	: Jawaban

Tabel 3.4 Laporan Surat Pertanggung Jawaban

Nama	
Dokumen	: Laporan KRA
	: BPP (Bendahara Pengeluaran
	: Pembantu)
Sumber	: Untuk Mengetahui Jumlah
Fungsi	: Anggaran Yang Digunakan
Media	: Kertas
Rangkap	: 5
Frekuensi	: Setiap Akhir Triwulan
	: Laporan Kinerja Realisasi
Keterangan	: Anggaran

Tabel 3.5 Laporan Kinerja Realisasi Anggaran

4. Implementasi

Gambar 4.1
 Implementasi Antar Muka Halaman Login

Gambar 4.2
 Implementasi Antar Muka Halaman Menu Utama

Gambar 4.3
 Implementasi Antar Muka Halaman Input Rekening

Gambar 4.4
Implementasi Antar Muka Halaman
Input Data Penandatanganan

Gambar 4.5
Implementasi Antar Muka Halaman Input
Transaksi Realisasi Anggaran

Gambar 4.6
Implementasi Antar Muka Halaman
Input Rekap Realisasi Anggaran

Gambar 4.7
Implementasi Antar Muka Halaman
Laporan Surat Pertanggung Jawaban

Gambar 4.8
Implementasi Antar Muka Halaman
Laporan Surat Pertanggung Jawaban

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan dan perancangan mengenai pembuatan aplikasi pelaksanaan anggaran biaya operasional maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Aplikasi ini maka proses pada saat mencatat akan lebih cepat dan dapat mempermudah dalam penginputan data pelaksanaan anggaran untuk biaya operasional berdasarkan bukti pengeluaran biaya operasional. Sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat menghemat waktu, adanya proses terkomputerisasi dapat mengotomatisasikan pencatatan dan adanya peningkatan kualitas pada laporan atau informasi yang dihasilkan.
2. Setelah dibangun Aplikasi ini maka Bagian BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan BP (Bendahara Pengeluaran) akan dapat lebih mudah dalam mengevaluasi laporan setiap bulannya dan tidak perlu lagi adanya keterlambatan dalam pelaporan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran yang di buat oleh Bagian BPP .
3. Pengolahan data secara terkomputerisasi akan membantu mengatasi permasalahan dan membuat data lebih akurat dan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat *human error*. sehingga dibangun aplikasi yang mampu menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran biaya operasional seperti laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan laporan KRA

(Kinerja Realisasi Anggaran) secara otomatis sesuai dengan inputan yang telah diinputkan ke aplikasi dan menjadikan laporan akan selalu tersedia ketika ada pihak yang membutuhkan baik dalam waktu yang ditentukan atau pada waktu tertentu.

Untuk itu, demi mencegah timbulnya masalah baru pada proses penggunaan aplikasi yang akan diterapkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam pengoperasian komputer dan penggunaan aplikasi, sebaiknya karyawan dibekali dengan pelatihan mengenai bagaimana cara menggunakan komputer dan aplikasi yang akan diterapkan agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan data pada komputer itu sendiri.
2. Perlu adanya pemeliharaan dan perawatan secara rutin baik terhadap perangkat keras maupun pada perangkat lunak demi kelancaran dan kelangsungan proses pengolahan data pelaksanaan anggaran biaya operasional.
3. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukan adanya pengamanan data dengan cara membuat cadangan data pengolahan seperti back-up data agar data-data yang telah diproses dapat terselamatkan.
4. Dalam proses pengolahan data pelaksanaan anggaran biaya operasional sebaiknya tidak dilakukan oleh bagian lain, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penginputan maupun pembuatan laporan pelaksanaan anggaran biaya operasional dapat dicegah dan diminimalisir.

Daftar Pustaka:

- [1] Abdul, K. (2009). *Dasar Perancangan dan Implementasi Data Base Relasional*. Yogyakarta: Andi.
- [2] Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [3] Mamesah, D. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Marlyaningrum, A. (2014). Sistem Pakar Kerusakan Komputer. *Sistem Pakar Kerusakan Komputer* (hal. V2-V4). Bandung: Widyatama.
- [5] Munandar, M. (2001). *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- [6] Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Pahlevy, T. R. (2010). *Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa dengan Menggunakan Metode Simpele Additive Weighting (SAW)*. Surabaya.
- [8] Pohan, H. I. (1997). *Pengantar Perancangan Sistem*. Jakarta: Erlangga.
- [9] Rachmad Hakim S dan Ir.Sutarto, M. (2009). *Mastering Java*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- [10] Sudarsono, E. d. (2001). *Konsep Ekonomi : Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.